

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat membuat manusia tidak bisa menghindarinya. Banyak tuntutan yang membuat manusia harus bergerak cepat dan mampu beradaptasi dengan teknologi demi menunjang kualitas berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memanfaatkan adanya teknologi informasi dengan tujuannya dapat memudahkan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang mengamanatkan pemerintah daerah menyelenggarakan (SIKD) di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) sejak tahun 2012 guna perbaikan tata kelola yang lebih baik di pemerintahan (Alfian: 2015). Muhamad Masyur selaku Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP DIY saat itu

berharap bahwa SIMDA keuangan bisa mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membantu kinerja pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat yang di olah dari data transaksi keuangan.

Menurut Jogiyanto (2007), pengimplementasian atau pengembangan sistem teknologi informasi oleh suatu organisasi harus mempertimbangkan aspek manusia karena sistem tersebut bersama dengan manusia menjadi komponen dari organisasi. Berhasil tidaknya penerapan teknologi informasi tersebut akan sangat tergantung pada faktor manusia yang berhadapan langsung atau berinteraksi dengan teknologi tersebut. Interaksi ini menimbulkan masalah keperilakuan (*behavioral*). Banyak sistem informasi yang gagal diterapkan Karena manusianya menolak atau tidak memiliki niat untuk menggunakannya karena berbagai alasan. Demikian halnya dengan penggunaan atau pemanfaatan (SIKD) di Kabupaten Kulon Progo, belum tentu dirasakan manfaatnya oleh pegawai/pemakai sistem, karena penggunaannya tidak selalu mendatangkan kemudahan bagi pegawai. Bahkan sebaliknya, keberadaan teknologi informasi tersebut dapat mendatangkan kesulitan bagi penggunanya karena berbagai alasan, sehingga niat pegawai untuk menggunakan (SIKD) berkurang.

Technology Acceptance Model (TAM) atau model penerimaan teknologi adalah salah satu teori yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun

1986 yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (Jogiyanto, 2007). Hasil penelitian Al-Ammary *et al* (2014), mengungkapkan bahwa persepsi kesenangan memiliki dampak yang kuat pada persepsi kemudahan penggunaan, sedangkan Heerink *et al* (2008), menyimpulkan bahwa persepsi kesenangan tidak berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Penelitian Purnomo dan Lee (2012), menyatakan bahwa pengalaman terkait dengan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, sedangkan Burton-Jones dan Hubona (2006), menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan atas *word processing system*. Penelitian Tang dan Chiang (2009), menunjukkan bahwa keyakinan diri berkomputer memengaruhi persepsi kegunaan, sedangkan Lee *et al* (2013), menyatakan bahwa keyakinan-diri berkomputer tidak signifikan memengaruhi persepsi kegunaan.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan yang dibuat tersebut mempunyai tujuan untuk membantu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun APDB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sesuai tentunya juga didukung oleh respon positif dari pengguna sistem informasi tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi computer yang diberi nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Penelitian ini didasari oleh perkembangan sistem pemerintah yang ditelusur melalui berita di *website* BPKP. Menurut BPKP, sistem teknologi informasi yang digunakan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini mengacu pada PP 105 tahun 2000 dan dilengkapi dengan PP Nomor 71 tahun 2010 untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38. Laporan yang dihasilkan sesuai PP 105/2000 berupa laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, operasional, aliran kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan neraca dan aliran kas oleh pemerintah daerah merupakan suatu titik awal untuk memulai era keterbukaan di dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis merumuskan judul penelitian “Analisis Persepsi Penerimaan Teknologi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Penggunaan SIMDA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh persepsi penerimaan teknologi SKPD terhadap penggunaan SIMDA di Kabupaten Kulon Progo?”

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berkaitan dengan responden yang adalah para pegawai SKPD yang hanya menggunakan SIMDA pada tahun 2020 di Kabupaten Kulon Progo.
2. Persepsi yang di gunakan melalui indikator *Perceived Ease of Use*, *Perceived Usefulness*, *Voluntariness*.
3. Penggunaan SIMDA melalui indikator *Attitude towards Using Technology*, *Behavioral Intention to Use*, *Actual Technology Use*, dan *Complexity*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengeruh persepsi penerimaan teknologi SKPD terhadap penggunaan SIMDA di Kabupaten Kulon Progo?”.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaan secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi SKPD Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kemampuan SKPD dalam penggunaan SIMDA di Kulon Progo.

b. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pihak kampus dengan bukti empiris mengenai penggunaan SIMDA di Kabupaten kulon Progo.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana menambah pengetahuan dalam penerapan teori TAM yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SKPD Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi untuk memberikan tindak lanjut untuk pengoptimalan penggunaan SIMDA di Kulon Progo.

b. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Penelitian ini di harapkan memberi motivasi bagi pihak kampus untuk memperkenalkan sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah pada para masiswanya untuk bekal dalam memasukii dunia kerja dalam pemerintah daerah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk melihat dan mengamati proses kinerja SKPD dan menghayati praktek jalanya sistem informasi di pemerintah daerah.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang terjadi sehingga dijadikan objek penelitian; dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yang akan diteliti, batasan, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka penulisan skripsi.
- BAB II Landasan teori dan pengembangan hipotesis, bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam perumusan hipotesis serta dalam menganalisis hasil penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan model penelitian.
- BAB III Metode penelitian, bab ini membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional yang berisi deskripsi dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan beserta jumlahnya; populasi serta sampel penelitian; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; metode analisis mendeskripsikan tentang instrument penelitian serta teknik analisis yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi gambaran umum objek penelitian serta membahas tentang sampel dan variabel yang

berkaitan dengan penelitian, analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah untuk dibaca oleh pihak lain.

- BAB V Kesimpulan dan implikasi, bab ini berisi tentang hasil evaluasi yang telah dirangkum menjadi suatu kesimpulan dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya